PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Jojo Juhaeni

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
juhaenijojo@gmail.com)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum. Bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum adalah seseorang atau pejabat publik yang diberi wewenang dalam suatu jabatan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan tujuan memperkaya diri dan kelompok tertentu dan merugikan banyak orang atau masyarakat umum. Sosiologi hukum berperan penting dalam pemberantasan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) sebagai alat/media sosialisasi kepada masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang oleh orang (pejabat publik) berupa korupsi atau tindakan lain yang merugikan negara. negara/masyarakat agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengawasi jalannya hukum. proses penegakan hukum sehingga timbul rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Publik, Sosiologi Hukum

Abstrak

The purpose of this study is to analyze the abuse of authority by public officials in the perspective of the sociology of law. The form of abuse of authority (detournement de pouvoir) by public officials in the perspective of the sociology of law is a person or public official who is given authority in a position and uses it for personal and group interests with the aim of enriching oneself and certain groups and harming many people or the general public. Sociology of law plays an important role in eradicating abuse of authority (detournement de pouvoir) as a tool/ media for socialization to the public about abuse of authority by people (public officials) in the form of corruption or other actions that are detrimental to the state/ society so that the community can play an important role in overseeing the course of the law. the process of law enforcement so that a sense of justice arises for the community.

Keywords: Abuse of Authority, Public Officials, Sociology of Law

PENDAHULUAN

Pejabat publik adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Pejabat publik diberikan kekuasaan dan kepercayaan karena dianggap sebagai bagian dari demokrasi dan tidak ada pemerintahan yang demokratis tanpa adanya tanggung jawab kepada rakyat.

Wewenang dalam sosiologi hukum diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan logis antara sosiologi hukum dan politik menjadikan setiap pembahasan tentang sosiologi hukum dan politik, selalu melibatkan kekuasaannya didalamnya. Itulah sebabnya membahas sekularisasi kekuasaan. Sekularisasi politik dalam sosiologi hukum secara implisit bertujuan untuk mendesakralisasi kekuasaan untuk

tidak dilegitimasi sebagai sesuatu yang bersifat sakral atau suci. Kekuasaan sebagai aktivitas politik harus dipahami sebagai kegiatan manusiawi yang diraih, dipertahankan sekaligus direproduksi secara terus menerus (Siahaan, 2013).

Hukum di Indonesia masih menunjukkan masih terjadi ketimpangan keadilan di mata hukum. Hal ini ditandai dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkan penyalahgunaan wewenang tertinggi di Asia, dalam hal ini penyalahgunaan yang dimaksud yaitu korupsi. Lembaga pemantau indeks korupsi global, *Transparency International* merilis laporan bertajuk '*Global Corruption Barometer-Asia*' dan Indonesia masuk menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India diikuti Kamboja di peringkat kedua. Peneliti *Political and Public Policy Studies*, Jerry Massie mengatakan, ini terjadi lantaran lemahnya hukuman di Indonesia. Selain itu, dia menambahkan, aturan terkait korupsi kerap berubah-ubah dan partai politik menjalankan sistem 'mahar politik' (Merdeka, 2020).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosiologi hukum (*sociology of law*), mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan seras mengubah sistem itu (Shalihah, 2017).

Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat

dalam konteks sosial. Masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum digunakan untuk mewujudkan keteraturan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum, sehingga segala perbuatan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum. Jalan panjang dalam menapaki dan menyusuri kehidupan hukum di dalam masyarakat semakin dirasakan pada zaman modern, bahkan memasuki dunia globalisasi maupun modernisasi.

Detournement de pouvoir berasal dari kata *detourne* dan *pouvoir*, *detourne* adalah menyimpang, berputar, tidak langsung, mengambil jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuan. Sedangkan *Detournement* adalah menyimpang, pembelokan, penyelewengan, penggelapan. *Pouvoir* adalah kemampuan, kekuasaan menurut hukum (Mardzuki, 2012). Penyalahgunaan diartikan dalam tiga (3) wujud (Hiariej, 2012):

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Secara sosiologi hukum, banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia terjadi disebabkan oleh (Rianto, 2012):

1. Kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan
Banyak pejabat public yang tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki segalanya termasuk kekuasaan sehingga

banyak yang menyalahgunakan wewenang.

2. Memiliki pandangan bahwa "*orang yang memiliki wewenang dapat bertindak bebas*"

Pejabat publik atau pemimpin beranggapan bahwa seorang pejabat publik atau pemimpin memiliki jabatan tinggi akan bebas bertindak sesuka hati atau memiliki wewenang tidak terbatas atau bebas.

3. Lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang

Banyaknya fenomena bahwa rakyat biasa jika melakukan kesalahan kecil hukumannya berat dan lama, akan tetapi jika pejabat publik atau pemimpin meskipun kesalahannya fatal hukumannya ringan. Hukum di Indonesia cenderung tajam ke bawah tumpul ke atas.

4. Moral dan mental yang lemah

Seseorang yang diberikan wewenang atau jabatan tinggi namun memiliki moral yang buruk misalnya korupsi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan tidak akan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sesuai wewenangnya.

5. Tuntutan ekonomi

Semakin tinggi jabatan, biasanya kebutuhan hidup juga makin tinggi. Pengeluaran yang besar pasak daripada tiang mengakibatkan seorang pejabat dapat menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan materi bagi diri sendiri.

6. Pengawasan yang lemah

Kurangnya pengawasan dari atas dan pihak-pihak yang terkait, misalnya dalam pengawasan anggaran.

Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang salah satu dari sekian banyaknya kasus, di antaranya contoh kasus (KPK, 2021):

1. Kasus Penyalahgunaan Wewenang Mantan Staf Khusus Kepresidenan

Milenial tanggal 16 April 2020 (Suaranews, 2020)

Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andi Taufan Garuda Putra akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Andi dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait isi surat berkop Sekretariat Kabinet yang meminta para camat untuk melibatkan PT Amarta Mikro Fintek dalam penanganan Covid-19. Pelaporan tersebut dilakukan oleh M Sholeh. Kekinian, M Sholeh sudah berada di Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan dugaan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Andi Taufan.

2. Kasus Penyalahgunaan Wewenang Kekuasaan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia tanggal 17 Desember 2019 (TimesIndonesia, 2019)

Direktur Utama PT. Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, dicopot oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Askhara Danadiputra dicopot lantaran kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson juga dua sepeda mewah Brompton. Barang ini diselundupkan dalam pesawat Airbus A3330-900 NEO yang terbang perdana dari Perancis ke Indonesia. Beberapa kasus Garuda Indonesia 2019 terjadi dalam satu tahun pada masa pimpinan Direktur Utama Ari Askhara:

- a. Masalah Garuda Indonesia, Duopoli Garuda Indonesia dengan Lion Air: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memeriksa indikasi praktik kartel atau duopoli yang dilakukan Garuda Indonesia. Ini terkait kenaikan tarif pesawat dan biaya kargo. KPPU memutuskan untuk menaikkan penyelidikan kasus kartel tiket pesawat ke tingkat pemberkasan.
- b. Praktik Monopoli dan Rangkap Jabatan Ari Askhara: Ari Askhara dengan Direktur Niaga Garuda Indonesia

- Bapak Pikri Ilham Kurniansyah dan Direktur Utama Citilink Indonesia Bapak Juliandra Nurtjahjo menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sriwijaya Air setelah Sriwijaya Air bergabung dengan grup Garuda Indonesia. Ini dianggap melanggar pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999. UU itu menyebutkan bahwa seseorang tidak bisa menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dan bersamaan merangkap jadi direksi di pasar yang sama.
- c. Masalah Garuda Indonesia, Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia: RUPSLB Garuda Indonesia pada 24 April 2019 memunculkan kasus perseteruan manajemen Garuda Indonesia tentang laporan keuangan. Komisaris maskapai ini, Chairul Tanjung dan Dony Oskaria, tolak laporan keuangan Garuda. Para komisaris keberatan dengan pengakuan pendapatan Garuda Indonesia atas transaksi antara PT. Mahata Aero Teknologi dengan PT. Citilink Indonesia, yaitu anak usaha Garuda. BEI, OJK, hingga BPK dan Kemenkeu telah turun tangan menghadapi masalah Garuda Indonesia terkait kasus laporan keuangan. Pihak Kemenkeu menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor laporan keuangan Garuda Indonesia. Sejumlah denda sebesar 1,25 M harus dibayar pihak Garuda Indonesia atas laporan keuangan yang bermasalah.
 - d. Monopoli Tiket Perjalanan Umroh: Protes pemeriksaan terhadap kebijakan Garuda dalam pembelian tiket pesawat Garuda Indonesia digelar pada pertemuan dengan KPPU Balikpapan. Dugaan praktik monopoli ini masih kuat dan diselidiki oleh KPPU.
3. Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Luar Pulau Bengkalis tanggal 03 September 2021
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka terkait dugaan TPK pada proyek multi years Peningkatan jalan Lingkar Luar Pulau Bengkalis, Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015. Tiga tersangka tersebut adalah DH Project Manager PT WIKA (Persero), FT (Staf pemasaran PT WIKA), dan TAK (PPK). Kepada mereka dilakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai 3 September 2021 s/d 22 September 2021 masing-masing di rutan KPK Gedung Merah Putih, rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, dan rutan KPK Kav C1. Atas perbuatannya para tersangka, disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. DH dan TAK dalam proses pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Pulau Bengkalis Kab. Bengkalis berperan aktif dalam memanipulasi penyusunan berbagai dokumen proyek seolah telah selesai dikerjakan 100 % sehingga bisa dilakukan pencairan pembayaran termin terakhir diakhir Desember 2015 dimana saat itu belum dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO). Akibat perbuatan para tersangka, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp129 Miliar dari nilai proyek sebesar Rp359 Miliar. KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari PPK, kontraktor, dan pihak PT WIKA.

4. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Banjarnegara tanggal 03 September 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BS (Bupati Banjarnegara periode 2017-2022) dan KA (swasta) sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018. KPK menetapkan tersangka setelah melakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan pada bulan Mei 2021. Atas perbuatannya, BS dan KA disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (i), Pasal 12 huruf (e), Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para Tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 September 2021-22 September 2021, BS di tahan di Rutan KPK pada Kavling C1 dan KA ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. BS berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, mengatur pemenang lelang. KA sebagai orang kepercayaan BS selalu dipantau serta diarahkan oleh BS saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik BS yang tergabung dalam grup BM. Penerimaan komitmen fee senilai 10 % oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantara

KA. Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 Miliar.

5. Penyalahgunaan Wewenang Jaksa di Kejaksaan Agung Negeri Manado tanggal 30 Maret 2021

Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan Kejagung, Amir Yanto mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memanggil serta menindaklanjuti perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum di Kejaksaan Negeri Manado tersebut. Awal mula perkara itu terjadi di bulan Maret 2019 ketika Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado memerlukan alat untuk pembakar sampah umum atau mesin incennerator sebanyak 4 unit senilai Rp9,8 miliar dan 1 unit alat pembakar sampah medis senilai Rp990 juta yang memakai anggaran APBD Perubahan Kota Manado Tahun Anggaran 2019. Pelapor (Pengusaha) menggandeng PT ANM dan CV JS untuk pelaksana pengadaan barang itu. *"Tetapi mereka masih belum melunasinya, masih kurang Rp2,5 miliar. Kemudian mendadak kasus ini langsung ditangani Kejaksaan Negeri Manado"*. Pelapor (Pengusaha) juga mencurigai dugaan kongkalikong antara oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Manado dengan Pemerintah Kota Manado terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan incennerator yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Manado.

6. Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Jabodetabek 01 September 2021

Terdakwa kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020, Matheus Joko Santoso, divonis 9 tahun penjara. Joko disebut terbukti melakukan korupsi pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 bersama Juliari Batubara dan Adi Wahyono (Kompas, 2021).

7. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka AY, swasta, dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan tersangka AY selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 3 September 2021 s/d 22 September 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran Covid 19 di dalam lingkungan Rutan KPK. AY sebagai pelaksana pengadaan pekerjaan Pengembangan SDM dan Strategi Korporat menggunakan bendera dua perusahaan dengan pemberian komitmen fee. Selain itu diduga adanya pencantuman nama para ahli dalam kontrak pekerjaan hanya dipinjam sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang. Akibat perbuatan tersangka, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp3,6 Miliar.

8. Kasus Suap Ekspor Benur atau Benih Lobster yang dilakukan oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tanggal 26 November 2020

Kasus ini bermula dari diterbitkannya surat keputusan oleh Menteri Edhy Prabowo tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya

Lobster. Tim ini bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh perusahaan calon eksportir benih lobster atau benur. Edhy menunjuk staf khususnya: APM dan SAF sebagai ketua dan wakil ketua tim uji tuntas tersebut. Pada Mei 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencabut aturan larangan ekspor benih lobster yang sempat dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Pencabutan itu diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) No 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI.

9. Kasus Korupsi Pembangunan *Run Way* Landasan Pacu Bandara Muhammad Sidik Muara Teweh oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara oleh Agustinus Sujatmiko

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 7/1/2021 sekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama Agustinus Sujatmiko, ST, M.Si bin Ignatius Sunarto selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bandar Udara Muhammad Sidik Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Lapangan Parkir Bandar Udara Muhammad Sidik Muara Teweh Kabupaten Barito Utara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.103.880.913,00 (satu milyar seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Jalan PKP-PK yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.336.050.394, 00 dari Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Rahmad Isnaini, SH dkk kepada Tim Penuntut Umum Ramdhani, SH selaku Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Barito Utara bertempat di Lembaga Pemasarakatan

Kelas IIA Palangka Raya. Dalam perkara ini tersangka didampingi Penasihat Hukum B Hary Setiawan, SH., MH dan tidak dilakukan penahanan, karena tersangka juga merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman selama 3 tahun penjara dalam perkara tipikor Pembangunan Landasan Pacu, Taxi Way, Apron pada Bandara yang sama yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam perkara ini tersangka disangka melanggar Primair dengan Pasal 2, jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3), UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidiar dengan Pasal 3, jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3), UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Serah terima tersangka dan barang bukti dalam keadaan aman terkendali, untuk selanjutnya dalam waktu 10 hari ke depan, perkara ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya.

10. Kasus Penggelapan Dana PDAM Kalimantan Timur oleh Direktur Utama PDAM Kalimantan Timur tanggal 28 April 2021

Dirut PDAM Tirta Kencana Samarinda dipolisikan warga atas dugaan kasus penggelapan. Pelaporan ini didasari pengalihan dua meteran air dari warga yang sudah membayar senilai Rp5,1 juta pada 2012. Namun meteran itu diduga dialihkan atau dijual kembali ke pelanggan lain. Warga yang melaporkan itu bernama Erwin Wahyudi. Melalui kuasa hukumnya, Aras, dijelaskan bahwa setelah pembayaran itu, selama delapan

tahun berjalan, PDAM tak melakukan tugasnya dalam memasang dua meteran tersebut. Hingga pada 2020, diketahui nomor meteran air yang sudah dibeli itu berpindah tangan.

Realita hukum di Indonesia menunjukkan masih terjadi ketimpangan keadilan di mata hukum. Diskriminasi di kalangan napi masih terjadi salah satunya adalah hasil temuan Ombudsman RI dalam sidak yang diadakan pada tanggal 21 Desember 2019 di lapas Sukamiskin, mendapati sel mewah milik Setya Novanto dan Nazaruddin. Kedua narapidana korupsi tersebut mendapatkan sel baknya di hotel dengan ukuran kamar yang lebih luas ketimbang kamar narapidana lainnya. Pemandangan tersebut berbanding terbalik dengan lapas Bagansiapiapi, para narapidana harus rela berdesak-desakkan karena lapas mengalami overcapacity sampai 800 persen (Zaenalddkk, 2021).

Potret ketidakadilan hukum semakin ironi tatkala dikaitkan dengan kasus hukum yang menimpa lansia, tercatat pada tahun 2009-2020 setidaknya terdapat lima kasus yang menimpa lansia di antaranya kasus Kakek Samirin, Nenek Saulina, Nenek Asyani, kasus Nenek Minah dan kasus yang menimpa pasangan lansia Anjol Hasyim dan Jamilu Nina. Potret ketidakadilan hukum yang terjadi antara narapidana korupsi dengan narapidana lainnya seakan membenarkan Teori Kelas dari Karl Marx bahwa kehidupan ini adalah soal pertentangan kelas dan selamanya akan terkotak-kotakkan antara yang kaum berkuasa (*superpower*) dan kaum yang dikuasai (*powerless*) (Zaenalddkk, 2021).

Kasus diatas merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) oleh pejabat publik baik kepentingan sendiri maupun kepentingan golongan yang merugikan banyak pihak dan negara. Dalam hal

perkembangan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang memiliki jabatan melekat dengan kekuasaan, untuk itu diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi tindak pidana korupsi dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat untuk saling bahu membahu serta perlu dilakukan pendekatan untuk perubahan dengan cara kriminologi, sosiologi, dan yuridis formal (Aslia, 2015).

Oleh karena itu jumlah kasus penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) baik korupsi maupun penyalahgunaan dalam bentuk lainnya yang tidak sedikit, diperlukan sosiologi hukum sebagai upaya penegakan hukum serta perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang ada di masyarakat khususnya di dalam suatu ruang lingkup masyarakat, agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan kepentingan dan wewenang.

SIMPULAN

Bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum yaitu seseorang atau pejabat publik yang diberikan wewenang dalam suatu jabatan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun golongan tertentu dan merugikan banyak orang atau masyarakat umum. Sosiologi hukum berperan penting dalam memberantas penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) sebagai alat/ media sosialisasi kepada masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan orang (pejabat publik) dalam bentuk korupsi maupun tindakan lain yang merugikan negara/ masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan peran penting untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum sehingga timbul rasa adil bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslia, A. M. (2015). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Terhadap Tindak Pidana Korupsi. <https://media.neliti.com/media/publications/281777-penyalahgunaan-wewenang-dalam-jabatan-te-f14498ce.pdf>, 1.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Kompas, K. (2021, September 01). Retrieved September 18, 2021, from www.kompas.com/kasus/korupsi/bansos
- KPK, K. P. (2021, September). Retrieved September 18, 2021, from www.kpk.go.id/berita/korupsi
- Mardzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Merdeka, K. (2020, Agustus 09). Retrieved September 18, 2021, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html>
- Rianto, A. (2012). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, H. (2013). *Pengantar Sejarah dan Teori Sosiologi Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Suaranews. (2020, April 16). Retrieved September 18, 2021, from <https://www.suara.com/news/2020/04/16/130625/diduga-salah-gunakan-wewenang-stafsus-presiden-dilaporkan-ke-mabes-polisi?page=all>
- TimesIndonesia. (2019, Desember 17). Retrieved September 18, 2021, from <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/243499/membongkar-penyalahgunaan-kekuasaan-direktur-utama-pt-garuda-indonesia>
- Zaenaldkk. (2021). Korupsi dalam Perspektif Sosiologi Hukum oleh Zaenal Mustopa, Ramdani Wahyu Sururie, Aah Tsamrotul Fu'adah. *Hermeneutika Vol 5 No 2*, 227.